

PERAN PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ACEH (PDIA) SEBAGAI LEMBAGA PELESTARIAN SUMBER SEJARAH ACEH

¹⁾Adelia Darma Hendra ²⁾Ida Hasanah, ³⁾Muhammad Nur

¹²³⁾Program studi pendidikan sejarah FKIP, Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia

Article Info

Email Corresponding Author:
Adeliadarmahendra499@gmail.com

Keywords: *Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), Pelestarian sumber sejarah, Sejarah Aceh.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) sebagai Lembaga Pelestarian Sumber Sejarah Aceh. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif digunakan untuk mengetahui Peran Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh sebagai pelestarian sumber sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) didirikan pada tahun 1975 untuk melestarikan sejarah dan budaya Aceh, terutama melalui penyimpanan dokumen berharga seperti manuskrip kuno, foto, dan artefak sejarah. PDIA berperan penting dalam menjaga identitas budaya Aceh, memfasilitasi penelitian, dan menjadi sumber utama bagi akademisi yang mempelajari sejarah Aceh. Meskipun demikian, PDIA menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan fasilitas, serta rendahnya kesadaran publik. Upaya digitalisasi dan penguatan infrastruktur sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan peran PDIA di masa depan.

PENDAHULUAN

Pendidikan Sejarah adalah cerminan dari pengalaman kolektif suatu komunitas atau bangsa, yang membentuk identitas dan kepribadian nasional. Seperti halnya individu yang pengalaman hidupnya membentuk karakter dan identitas, demikian pula bangsa membentuk identitasnya melalui sejarah. Tanpa pemahaman akan sejarah, sebuah bangsa dapat diibaratkan seperti individu yang kehilangan memori, yang bisa kehilangan jati dirinya (Kartodirdjo, 1993:50).

Dalam studi sejarah, dokumen menjadi aspek penting karena berfungsi sebagai sumber primer. Dokumen sejarah memberikan informasi langsung dari masa lalu, membantu kita memahami peristiwa yang terjadi. Menurut Silalahi, sumber primer

adalah objek atau dokumen asli yang berasal dari pelaku utama suatu peristiwa (Ulber, 2006:266). Karena pentingnya dokumen-dokumen ini, diperlukan lembaga yang menjaga keamanan dan keaslian sumber-sumber sejarah tersebut.

Di Aceh, peran penting ini dipegang oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pusat koleksi buku dan manuskrip langka tentang sejarah Aceh. PDIA didirikan sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Aceh dan Universitas Syiah Kuala. Lembaga ini dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh dan Universitas Syiah Kuala pada tahun 1975.

Gagasan pembentukan PDIA pertama kali muncul pada seminar Pekan Kebudayaan Aceh II tahun 1972 di Banda Aceh oleh Dr. Teuku Ibrahim Alfian, M.A. Beliau menyarankan dibentuknya sebuah institut yang serupa dengan "Atjeh Instituut" yang pernah didirikan oleh Belanda pada tahun 1914 di Amsterdam, yang berfokus pada penelitian sejarah dan budaya Aceh (Sari & Hidayat, 2020). Pada tahun 1974, gagasan ini mulai terwujud dengan pendirian Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial di Darussalam, Banda Aceh. Dr. Ibrahim Hasan, Rektor Universitas Syiah Kuala saat itu, bekerja sama dengan Dr. Teuku Ibrahim Alfian untuk memperjuangkan pembentukan PDIA dengan bantuan dari Pemerintah Daerah Istimewa Aceh.

Selain dukungan dari pemerintah lokal, PDIA juga mendapat bantuan dari Belanda melalui proyek KA 013 yang merupakan bagian dari Kultureel Akkoord (Kerja Sama Kebudayaan). Salah satu tokoh penting dalam proyek ini adalah Drs. F.G.P. Jaquet dari Koninklijk Instituut voor Taal, Landen en Volkenkunde (KITLV), yang membantu dalam menyeleksi dan mengirimkan bahan-bahan informasi tentang Aceh dari Belanda ke Banda Aceh.

Pada masa persiapan pembentukan PDIA, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh menyediakan gedung yang sebelumnya digunakan sebagai tempat tinggal Asisten Residen Belanda dan kemudian pejabat Residen Aceh. Gedung ini direnovasi dan dipersiapkan untuk dijadikan kantor PDIA. Peresmian PDIA dilakukan pada tanggal 26 Maret 1977, bertepatan dengan 104 tahun pernyataan perang Belanda terhadap Kerajaan Aceh. Gedung ini resmi dibuka untuk umum pada 3 September 1977, dalam rangka peringatan hari jadi Universitas Syiah Kuala yang ke-16. PDIA awalnya bernama Pusat Dokumentasi Aceh, tetapi kemudian namanya diubah menjadi Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.

Pada awalnya, PDIA berlokasi di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim. Namun, lokasi PDIA kemudian dipindahkan ke kompleks Museum Aceh di Jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah. Gedung awal PDIA saat ini telah dialihfungsikan menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Syiah Kuala. Proses pengalihan ini sempat menimbulkan ketegangan antara PDIA dan Universitas Syiah Kuala (Sari & Hidayat, 2020). Meski terjadi perdebatan, akhirnya tanah dan gedung PDIA diwakafkan kepada Universitas Syiah Kuala pada tahun 1974 oleh Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Hasan Basri, S.H. Wakaf ini diperuntukkan bagi pembentukan PDIA sebagai pusat pelestarian sumber sejarah Aceh.

Saat ini, koleksi PDIA meliputi berbagai manuskrip, ebook, buku, foto, peta, dan dokumen sejarah lainnya. Beberapa di antaranya termasuk naskah-naskah langka tentang sejarah dan budaya Aceh, sebagian besar dalam bahasa Belanda dan Inggris. Koleksi ini memainkan peran penting dalam mendokumentasikan sejarah Aceh. Sebagai lembaga pelestarian sumber sejarah, PDIA menjalankan peran dalam beberapa bidang penting. Pertama, penelitian dan dokumentasi, di mana PDIA mengumpulkan dan mendokumentasikan artefak, manuskrip, dan dokumen yang memiliki nilai sejarah. PDIA juga melakukan penelitian untuk menggali lebih dalam sejarah Aceh (Sari & Hidayat, 2020).

PDIA berperan dalam konservasi dan restorasi artefak dan bangunan bersejarah. Lembaga ini memastikan kelestarian artefak melalui perawatan dan perbaikan, serta merestorasi artefak yang rusak atau terancam punah agar dapat kembali ke kondisi semula. Selain itu, PDIA memiliki peran edukatif melalui program-program pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. PDIA menyelenggarakan seminar, workshop, dan pameran untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pelestarian sejarah Aceh. Untuk menyebarkan informasi lebih luas, PDIA juga menerbitkan buku, jurnal, dan artikel terkait sejarah Aceh. PDIA aktif dalam membuat situs web dan media sosial yang memudahkan akses informasi sejarah bagi masyarakat luas. PDIA bekerja sama dengan pemerintah dan sektor pariwisata untuk mengembangkan pariwisata sejarah di Aceh. Ini termasuk membuat paket wisata edukatif yang mengajak wisatawan memahami sejarah dan budaya Aceh secara mendalam (Sari & Hidayat, 2020).

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala (Arikunto Suharsimi, 2006: 101). Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui Peran Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh sebagai pelestarian sumber sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode sejarah.

Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, penelitian ini dilakukan di kantor Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA). Lokasi kantor pusat dokumentasi dan informasi Aceh (PDIA) saat ini terletak di jalan. Sultan Mahmudsyah, peniti, kec. Baiturrahman, kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat dimana data-data yang dibutuhkan tersimpan. Yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah Direktur PDIA, para staf, dan Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sejarah Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA)

Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok tokoh Aceh yang peduli dengan pelestarian warisan budaya dan sejarah Aceh. Salah satu pendirinya adalah T. Hamid M. Daud, yang berperan besar dalam merumuskan visi lembaga ini sebagai pusat dokumentasi yang mengumpulkan dan menyimpan berbagai artefak serta dokumen penting terkait sejarah Aceh (Daud, 2019). Pendiannya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan hilangnya berbagai dokumen sejarah berharga, termasuk manuskrip kuno, foto, dan catatan peristiwa penting.

PDIA didirikan dengan tujuan mengamankan dan melestarikan dokumen-dokumen sejarah Aceh yang rentan hilang atau rusak. Sebagai daerah dengan sejarah panjang, termasuk era Kesultanan Aceh dan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, Aceh memiliki banyak peninggalan bersejarah yang perlu dijaga (Ibrahim, 2020). Keberadaan PDIA bertujuan melestarikan warisan ini agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Sebagai pusat arsip dan dokumentasi, PDIA menyimpan berbagai dokumen, artefak, dan catatan sejarah terkait dengan Aceh. Koleksinya mencakup manuskrip kuno tentang hukum Islam, adat istiadat, serta dokumen dari era kolonial hingga masa

modern. PDIA juga menyimpan rekaman peristiwa penting seperti konflik bersenjata di Aceh dan bencana tsunami 2004 (Zubir, 2021).

Menurut Direktur PDIA, lembaga ini tidak hanya menjadi pusat penyimpanan dokumen, tetapi juga sumber utama bagi akademisi dari dalam maupun luar negeri yang ingin mempelajari Aceh. Upaya digitalisasi di PDIA membantu menjaga dokumen-dokumen berharga serta memudahkan akses bagi peneliti yang tidak bisa datang langsung ke Aceh (Drs. Mawardi, M. Hum, MA: 2024).

Salah satu staf PDIA menegaskan bahwa lembaga ini penting dalam menjaga identitas budaya Aceh. Ia menekankan bahwa manuskrip kuno yang disimpan bukan hanya artefak sejarah, tetapi juga cerminan kebanggaan dan identitas masyarakat Aceh. Peran PDIA sangat signifikan dalam memastikan bahwa budaya dan tradisi Aceh dapat diwariskan kepada generasi mendatang (Prof. Dr. Husaini Ibrahim, MA: 2024). Staf lainnya juga mengemukakan bahwa PDIA memungkinkan generasi muda Aceh terhubung dengan sejarah mereka. Ia menyoroti peran PDIA dalam menjaga manuskrip dan foto sejarah yang memungkinkan peneliti, pelajar, dan masyarakat umum memahami lebih dalam tentang warisan Aceh. PDIA berfungsi sebagai "penjaga ingatan kolektif" masyarakat Aceh, terutama terkait peristiwa-peristiwa besar dalam sejarahnya (Drs. Teuku Abdullah, S.H., MA: 2024).

Seorang masyarakat juga menekankan kontribusi PDIA dalam mendokumentasikan pengalaman rakyat Aceh selama konflik dan bencana, yang merupakan "sejarah hidup" penting bagi generasi mendatang. Koleksi-koleksi tersebut dianggap penting dalam upaya rekonsiliasi dan pemulihan pasca-konflik di Aceh (Muhammad: 2024). Seorang guru sejarah menganggap PDIA sebagai pusat rujukan utama dalam penelitian budaya dan adat istiadat Aceh. Ia menekankan bahwa dokumen yang disimpan sangat membantu dalam studi tentang adat istiadat Aceh yang kaya, terutama dalam konteks peran Islam dan tradisi lokal. Ia juga mengapresiasi upaya PDIA dalam menyebarluaskan informasi budaya Aceh melalui publikasi dan kegiatan ilmiah (Ramlah: 2024).

Pendapat lain datang dari masyarakat yang mengalami langsung peristiwa sejarah Aceh, yang menyebut PDIA sebagai "harta karun sejarah Aceh yang luar biasa." Ia berpendapat bahwa PDIA telah menyelamatkan banyak pengetahuan penting tentang sejarah Aceh. Tanpa PDIA, banyak bagian dari sejarah Aceh yang berpotensi hilang. Ia

menekankan pentingnya peran PDIA dalam menyimpan dan melestarikan dokumen berharga, khususnya manuskrip kuno yang sangat penting untuk penelitian dan pemahaman budaya Aceh (Nyak Umar: 2024).

Dengan berbagai peran dan kontribusi ini, PDIA menjadi lembaga yang sangat vital dalam pelestarian sejarah dan budaya Aceh. Berbagai koleksi yang ada di dalamnya tidak hanya bermanfaat bagi akademisi tetapi juga bagi masyarakat umum untuk memahami dan menghargai warisan sejarah Aceh. Keberadaan PDIA diharapkan dapat terus berlanjut untuk generasi mendatang.

b. Peran Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh sebagai Lembaga Pelestarian Sumber Sejarah Aceh

Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) telah memainkan peran penting dalam melestarikan sumber sejarah Aceh. Sebagai lembaga arsip utama di daerah ini, PDIA berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan merawat dokumen berharga, termasuk manuskrip kuno, foto sejarah, artefak budaya, dan catatan peristiwa penting di Aceh. Sejarawan Teuku M. Daud menggambarkan PDIA sebagai “penjaga harta karun sejarah Aceh,” yang telah menyelamatkan banyak dokumen penting yang mungkin hilang seiring berjalannya waktu (Daud, 2019).

Dengan adanya PDIA, banyak sumber sejarah yang dulunya tersebar di berbagai tempat kini terpusat, sehingga memudahkan akses oleh peneliti dan masyarakat umum. PDIA juga memainkan peran krusial dalam pelestarian budaya Aceh. Manuskrip kuno yang disimpan tidak hanya mencerminkan sejarah politik dan ekonomi Aceh, tetapi juga nilai-nilai budaya dan keagamaan yang mendalam. Manuskrip tentang hukum Islam dan adat istiadat Aceh memberikan wawasan penting mengenai peran agama dalam kehidupan masyarakat Aceh selama berabad-abad.

Menurut peneliti budaya Herlina Zubir, "koleksi manuskrip kuno di PDIA adalah salah satu bukti nyata kekayaan intelektual Aceh di masa lalu" (Zubir, 2021). Dengan demikian, peran PDIA dalam menjaga dokumen-dokumen ini sangat penting agar identitas budaya Aceh tetap terjaga dan dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Selain itu, PDIA telah menjadi pusat penelitian bagi para akademisi dari dalam dan luar negeri.

Dr. Husaini Ibrahim dari Universitas Syiah Kuala menyatakan bahwa PDIA adalah lembaga utama yang menyediakan sumber informasi otentik tentang sejarah Aceh. Banyak akademisi yang datang untuk melakukan penelitian di PDIA, baik dalam bidang sejarah, sosial, maupun budaya. PDIA menyediakan akses ke dokumen-dokumen yang relevan, termasuk arsip penting mengenai konflik bersenjata di Aceh dan bencana tsunami 2004 (Ibrahim, 2020).

Peran PDIA tidak hanya terbatas pada dokumentasi fisik, tetapi juga meliputi upaya digitalisasi. Proses digitalisasi ini memastikan dokumen sejarah yang rentan terhadap kerusakan fisik dapat tetap terjaga dalam bentuk digital. Ahmad Hamzah, seorang aktivis budaya, menjelaskan bahwa digitalisasi penting untuk memperluas akses bagi masyarakat yang ingin mempelajari sejarah Aceh tanpa harus mengunjungi PDIA secara langsung (Hamzah, 2021). Dengan demikian, PDIA berfungsi tidak hanya sebagai penyimpan dokumen dan artefak bersejarah, tetapi juga sebagai lembaga yang secara aktif melestarikan dan mempromosikan sejarah serta budaya Aceh. Sejarawan Iskandar Zulkarnain menyatakan, "PDIA adalah penjaga memori masyarakat Aceh; tanpa lembaga ini, jejak sejarah Aceh bisa hilang" (Zulkarnain, 2020). Pendapat ini diperkuat oleh Direktur PDIA yang menekankan pentingnya lembaga ini dalam menyelamatkan dokumen berharga yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini di Aceh.

Staf PDIA juga menyatakan bahwa lembaga ini sangat diperlukan bagi akademisi yang ingin mendalami sejarah dan budaya Aceh. Ia menyoroti bahwa PDIA adalah sumber tak ternilai bagi peneliti. Upaya digitalisasi PDIA memungkinkan akses lebih luas terhadap koleksi sejarah Aceh tanpa harus mengunjungi pusat tersebut secara fisik (Prof. Dr. Husaini Ibrahim, MA: 2024).

PDIA memiliki peran strategis dalam melestarikan identitas budaya Aceh melalui koleksi manuskrip kuno yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum Islam. Drs. Teuku Abdullah, S.H., MA, menyatakan bahwa manuskrip di PDIA tidak hanya mencerminkan sejarah, tetapi juga menunjukkan kekayaan intelektual masyarakat Aceh. Ini menunjukkan kontribusi penting PDIA dalam mempertahankan nilai-nilai budaya Aceh di tengah arus globalisasi (Drs. Teuku Abdullah, S.H., MA: 2024).

Seorang masyarakat lokal mengungkapkan bahwa PDIA telah mengarsipkan ingatan kolektif masyarakat Aceh tentang masa-masa sulit, yang penting untuk proses

rekonsiliasi dan pemahaman sejarah di masa depan. Ia menyoroti pentingnya dokumentasi tersebut bagi masyarakat Aceh dalam mengatasi trauma dan belajar dari sejarah (Muhammad: 2024).

Sebagai lembaga yang berperan besar dalam mendidik generasi muda tentang sejarah Aceh, PDIA memberikan akses ke dokumen penting yang memungkinkan para peneliti dan mahasiswa untuk memahami perkembangan Aceh dari masa lalu hingga kini (Ramlah: 2024). Nyak Umar, seorang masyarakat yang mengalami langsung peristiwa sejarah, menekankan bahwa PDIA berperan besar dalam pelestarian adat dan budaya Aceh melalui dokumentasi manuskrip dan arsip sejarah, membantu penelitian tentang perkembangan adat dan peran agama dalam masyarakat Aceh (Nyak Umar: 2024).

c. Kendala Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh sebagai Lembaga Pelestarian Sumber Sejarah Aceh

Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) memainkan peran vital dalam melestarikan sejarah dan budaya Aceh, namun lembaga ini menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya dana yang memadai untuk mengelola dan merawat koleksi berharga yang dimiliki PDIA. Dokumen-dokumen kuno, termasuk manuskrip dan arsip yang berusia ratusan tahun, membutuhkan perawatan khusus agar tidak rusak. Keterbatasan anggaran menyebabkan perawatan yang diberikan tidak maksimal, menurut Dr. Husaini Ibrahim dari Universitas Syiah Kuala, “PDIA sering kali kekurangan dana untuk melaksanakan kegiatan pelestarian secara menyeluruh, terutama dalam menjaga dokumen yang sudah mulai rapuh” (Ibrahim, 2020).

Selain itu, PDIA juga mengalami kendala terkait dengan terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan arsip dan dokumen sejarah. Pengelolaan dokumen sejarah membutuhkan keahlian khusus, dan banyak dokumen di PDIA yang belum sepenuhnya terarsip dengan baik karena kurangnya staf yang memiliki keahlian di bidang ini. Hamzah, seorang aktivis budaya, menyatakan bahwa “banyak dokumen di PDIA yang belum sepenuhnya terarsip dengan baik karena kurangnya staf yang memiliki keahlian di bidang ini” (Hamzah, 2021). Akibatnya,

banyak dokumen yang belum terdokumentasi secara digital, memperlambat aksesibilitas untuk peneliti dan masyarakat umum.

Proses digitalisasi juga menjadi tantangan bagi PDIA. Digitalisasi merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan dokumen dan memperluas akses bagi mereka yang ingin mempelajari sejarah Aceh dari jauh. Namun, kendala teknis dan biaya tinggi dalam proses digitalisasi menjadi hambatan serius. Herlina Zubir, peneliti budaya, mencatat bahwa "upaya digitalisasi masih sangat terbatas karena perlunya peralatan canggih dan tenaga ahli, sementara PDIA masih belum mampu menyediakan hal tersebut secara menyeluruh" (Zubir, 2021). Hal ini mengakibatkan sebagian besar koleksi PDIA masih dalam bentuk fisik yang rentan terhadap kerusakan.

Ancaman lingkungan dan bencana alam juga menjadi kendala bagi PDIA. Aceh dikenal dengan risiko bencana, seperti gempa bumi dan banjir, yang menambah tantangan dalam melindungi koleksi sejarah di PDIA. Bencana tsunami 2004 menjadi pelajaran pahit, di mana banyak dokumen sejarah hilang atau rusak karena tidak tersimpan dalam fasilitas yang aman. Dr. Iskandar Zulkarnain, sejarawan, menyoroti pentingnya penyimpanan dokumen dalam kondisi aman dan tahan bencana, mengatakan bahwa "PDIA harus memiliki fasilitas penyimpanan yang lebih baik untuk melindungi koleksi mereka dari bencana alam, namun sayangnya, infrastruktur ini masih belum ideal" (Zulkarnain, 2020).

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian dokumen sejarah juga menjadi kendala tersendiri. Banyak masyarakat yang belum memahami peran PDIA dalam menjaga warisan sejarah Aceh. Akibatnya, dukungan publik dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung kelangsungan PDIA masih minim. Sejarawan Teuku M. Daud mencatat bahwa "kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan menyumbangkan dokumen sejarah mereka ke PDIA menjadi tantangan dalam pengembangan lembaga ini" (Daud, 2019).

Dengan demikian, kendala yang dihadapi PDIA sebagai lembaga pelestarian sumber sejarah Aceh tidak hanya berasal dari internal lembaga, seperti dana dan sumber daya manusia, tetapi juga faktor eksternal seperti ancaman bencana dan rendahnya kesadaran publik. Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan dukungan yang lebih luas, baik dari pemerintah, akademisi, maupun masyarakat umum, agar PDIA dapat terus menjalankan fungsinya dengan baik. Direktur PDIA menyatakan bahwa "PDIA

sering kekurangan dana untuk perawatan dokumen-dokumen penting, terutama manuskrip-manuskrip kuno yang memerlukan perhatian khusus agar tetap terjaga keasliannya" (Drs. Mawardi, M. Hum, MA: 2024).

Salah satu staf PDIA juga menekankan bahwa "PDIA kekurangan tenaga ahli yang dapat menangani pengelolaan arsip dan konservasi dokumen secara profesional." Banyak dokumen berharga di PDIA belum sepenuhnya terkelola dengan baik karena kurangnya staf yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut (Prof. Dr. Husaini Ibrahim, MA: 2024). Ini menghambat pengelolaan dan pelestarian dokumen berharga di PDIA.

Kendala lain yang dihadapi adalah masalah infrastruktur yang kurang memadai. Fasilitas penyimpanan di PDIA belum memadai untuk melindungi koleksi dokumen dari ancaman bencana alam. "Fasilitas penyimpanan di PDIA belum memadai untuk melindungi koleksi dokumen dari ancaman bencana alam seperti gempa dan banjir," ungkap seorang masyarakat yang menekankan perlunya peningkatan dalam aspek penyimpanan (Muhammad: 2024).

Selain itu, kurangnya kerjasama dengan lembaga internasional juga menjadi kendala bagi PDIA. Masyarakat menyatakan bahwa "PDIA memiliki potensi besar untuk berkolaborasi dengan lembaga internasional guna mendapatkan dukungan dalam hal konservasi dan digitalisasi, namun kendala administratif dan kurangnya jaringan internasional menjadi penghalang" (Nyak Umar: 2024). Dengan adanya kerjasama yang lebih luas, PDIA dapat lebih berkembang dan mendapatkan bantuan teknis serta pendanaan untuk mengatasi berbagai kendala.

KESIMPULAN

Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) adalah lembaga yang berperan penting dalam melestarikan warisan sejarah Aceh dengan mengumpulkan, merawat, dan mendokumentasikan dokumen berharga seperti manuskrip kuno dan foto sejarah. PDIA menjaga warisan budaya dan identitas Aceh, serta menyediakan sumber informasi otentik bagi peneliti dan akademisi. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, PDIA juga beradaptasi dengan melakukan digitalisasi dokumen untuk memperluas akses.

Demi keberlangsungan dan peningkatan kapasitas PDIA, dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional sangat diperlukan. Kolaborasi

dalam pendanaan, infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan kesadaran akan pentingnya pelestarian sejarah akan membantu PDIA mengatasi kendala yang dihadapinya. Dengan demikian, PDIA dapat terus menjalankan peran pentingnya sebagai penjaga warisan sejarah Aceh untuk generasi mendatang.

REFERENSI

- Ahmad, M, (2008). *Pelestarian Warisan Budaya di Aceh: Peran Lembaga dan Komunitas*. Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, Vol. 12, No. 2, 2018.
- Ainal Fajri, (2015). *Tradisi Manoe Pucoek Studi Kasus Terhadap Masyarakat Kuala Batee Aceh Barat Daya*. (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>, diakses 24 Oktober 2023.
- Chelshinta, C. (2022). *Pertunjukan Musik Dagung Pada Upacara Pernikahan Di Desa Bantan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Daud, Teuku M. "Sejarah dan Peran PDIA dalam Melestarikan Budaya Aceh." *Jurnal Sejarah Aceh*, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hamzah, Ahmad. "Digitalisasi Koleksi Sejarah di PDIA." *Aceh Today*, 2021. Ibrahim, Husaini. "PDIA sebagai Pusat Arsip dan Kajian Sejarah Aceh." *Aceh Cultural Review*, 2020.
- Ibrahim, Husaini. "PDIA sebagai Pusat Arsip dan Kajian Sejarah Aceh." *Aceh Cultural Review*, 2020.
- Juriyah, J. (2020). *Upaya Pelestarian Tradisi Tari Inai Di Desa Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Kuntowidjoyo, (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Mahmud, M, (2017). *Digitalisasi Manuskrip Aceh di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, 8 (1).
- Maleong, Laxy, (2006.) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nurdin, S. *Peran Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) dalam Pelestarian Budaya Aceh*. Jurnal Ilmu Budaya, 10 (2), 2015.
- Rahman, A., & Fitri, N, (2021). *Pengembangan Pariwisata Sejarah di Aceh: Studi Kasus Museum Tsunami*. Jurnal Pariwisata dan Budaya, Vol. 10, No. 4.
- Sari, R., & Hidayat, M, (2020) *Konservasi dan Restorasi Benda Cagar Budaya di Aceh*. Jurnal Konservasi dan Cagar Budaya, Vol. 15, No. 1.
- Sjamsuddin, Helius, (1996.) *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Sufi, Rusdi, (2009). *Sekilas Perjalanan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh*. Banda Aceh: PDIA.
- Suryadi, H, (2016). *Peran Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh dalam Pengembangan Penelitian Sejarah Lokal*. Jurnal Penelitian Sejarah, Vol 12, No 3.
- Sutarno Ns, (2003). *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Thamrin & Mulyana, Edy, (2011). *Perpustakaan di Aceh Sepanjang Masa*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.

- Trispratiwi, dkk, (2023). *Saujana Tugu Sumbu Filosofi Sebagai Kawasan Wisata Pusaka Kota Yogyakarta*. Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(3), 1289-1325.
- Yusuf, A, (2022). *Advokasi Kebijakan Pelestarian Warisan Budaya di Aceh*. Jurnal Kebijakan Publik dan Sejarah, Vol. 17, No. 2.
- Zain, M, (2019). *Peran Edukatif Lembaga Pelestarian Sejarah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 23, No. 3.
- Zainuddin, M, (2018). *Implementasi Program Pelestarian Budaya di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh*. Jurnal Warisan Budaya, 15 (4).
- Zubir, Herlina. (2021). *"Pentingnya Dokumentasi Manuskrip Aceh Kuno."* Aceh Heritage Journal.
- Zulkarnain, Iskandar. 2020 *"Peran PDIA dalam Menjaga Memori Kolektif Aceh."* Aceh Historical Review.